

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik antar kelompok pemuda Desa Dandang dan Buangin merupakan salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sebut saja misalnya konflik antarpemuda di Kecamatan Malangke Barat bertahun-tahun lalu, konflik di Kecamatan Baebunta yang terjadi bahkan di beberapa tempat, konflik di Baliase, Balebo-Ingkor, dan lain-lain adalah potret terjadinya disintegrasi sosial di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut tentu saja melahirkan kerugian di tengah-tengah masyarakat baik secara materil maupun non materil.

Akibat konflik-konflik tersebut, kelompok-kelompok yang bertikai mengeluarkan biaya yang cukup besar, baik itu untuk membiayai pembuatan senjata dan peluru, konsumsi berupa minuman keras dan makanan, biaya transportasi, renovasi rumah, perawatan korban luka-luka, dan lain-lain. Kerugian nonmateril pun sangat dirasakan. Terjadi instabilitas di tengah-tengah masyarakat, terputusnya hubungan kekerabatan dan persaudaraan, munculnya kecemasan dan ketakutan sosial, serta efek-efek lain yang sifatnya mental psikologis. Tidak hanya itu, konflik-konflik tersebut telah menelan korban jiwa sekian orang. Tentu saja hal-hal tersebut sangat merugikan masyarakat.¹

¹Hasrum Jaya, *Konflik Sabbang yang Tak Kunjung Padam*, dalam <http://hasrumjaya.blogspot.com>, diakses pada 10 Agustus 2013.

Konflik yang terjadi dan terus terulang sepanjang tahun akan semakin merugikan masyarakat terutama bagi kedua belah pihak yang bertikai. Oleh sebab itu, semua pihak yang berkompeten dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam menangani konflik tersebut. Tentu saja dengan metode dan strategi yang tepat sasaran, berorientasi pada pemecahan akar masalah sehingga konflik yang terjadi dapat teratasi dengan baik dan tidak terulang kembali. Salah satu unsur utama yang memiliki tanggungjawab besar dan penuh terhadap persoalan tersebut adalah instansi pemerintahan dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Dalam pandangan penulis, salah satu strategi dan teknis dalam upaya penyelesaian sebuah konflik adalah dengan cara bagaimana strategi komunikasi itu diterapkan. Strategi komunikasi yang dimaksud adalah bagaimana cara mengubah opini, sikap dan perilaku terhadap berbagai komponen yang terlibat dalam konflik di Desa Dandang-Buangin. Strategi komunikasi adalah suatu perencanaan dan manajemen dalam upaya menyelesaikan konflik, sebab hanya dengan melakukan komunikasi yang intens antara berbagai elemen maka seluruh elemen yang terlibat dalam konflik tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan seorang komunikator yang mampu mengkonsolidasikan persoalan tersebut kepada semua pihak khususnya pihak yang berkonflik sehingga dapat diterima dan dilaksanakan sehingga dapat menjadi solusi bagi persoalan tersebut.

Komunikasi dan konflik merupakan satu kondisi yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Dengan begitu komunikasi dan konflik menjadi satu aspek

penting yang harus dipelajari dan dikaji dengan baik, untuk menghasilkan pemahaman yang baik dan komprehensif. Sebagai suatu proses sosial, konflik membutuhkan satu mekanisme penghubung yang dikenal sebagai komunikasi. Fakta tersebut bisa dipahami, karena komunikasi merupakan satu aspek yang bisa digunakan pada semua bidang kehidupan.²

Kajian ini lebih terfokus pada peran komunikator dalam lingkup Pemerintah daerah Luwu Utara dalam upaya penyelesaian konflik di Desa Dandang-Buangin. Konflik merupakan sesuatu yang alamiah dan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari setiap kehidupan sosial masyarakat. Selama masyarakat masih memiliki kepentingan, kehendak serta cita-cita konflik senantiasa akan terjadi. Sebab dalam upaya untuk mewujudkan apa yang diinginkan pasti ada hambatan-hambatan bahkan mungkin bisa terjadi benturan-benturan karena adanya kepentingan antara individu dengan individu, atau kelompok dengan kelompok maka konflik sudah jelas akan selalu berpotensi terjadi.

Seorang komunikator dalam upaya menyelesaikan konflik dapat diposisikan sebagai penghubung, konsolidator antara berbagai komponen masyarakat yang terlibat dalam konflik. Saat ini kondisi yang terjadi pasca konflik Dandang-Buangin telah menunjukkan gejala positif di mana konflik itu dapat diselesaikan. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan konflik tersebut dapat terulang kembali jika tidak diantisipasi dengan baik oleh semua pihak khususnya Pemerintah daerah Luwu

²Dewanto Putra Fajar, *Komunikasi-Konflik dalam Perspektif Kehendak Bebas*, (Jurnal Komunikasi Massa Volume V No. 1 Januari 2012), h. 1.

Utara. Dalam sejarahnya, konflik Dandang-Buangin telah terjadi beberapa kali dan terus berulang setiap tahun sehingga timbul kekhawatiran, kondisi saat ini yang mulai kondusif dapat berubah kembali, konflik dapat terjadi lagi dan tentu saja akan meresahkan masyarakat, tidak hanya masyarakat Dandang-Buangin tetapi masyarakat Tana Luwu pada umumnya khususnya masyarakat Luwu Utara.

Konflik di Desa Dandang-Buangin dan peran komunikator Pemerintah daerah Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk diteliti. Penelitian tentang bagaimana strategi komunikasi dalam upaya penyelesaian konflik antara berbagai kalangan dan fenomena yang terlibat konflik dapat disatukan dalam suatu kesamaan pemahaman, penilaian dan persepsi melalui komunikasi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti konflik Desa Dandang-Buangin yang diformulasikan ke dalam sebuah judul penelitian “Efektifitas Peran Pemerintah Daerah Luwu Utara terhadap Penyelesaian Konflik Antarpemuda di Desa Dandang dan Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Studi Analisis Komunikator).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ilustrasi singkat pada latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Desa Dandang-Buangin Kec. Sabbang?
2. Bagaimana peranan Pemerintah daerah Luwu Utara terhadap penyelesaian konflik di Desa Dandang-Buangin Kec. Sabbang?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah daerah Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik di Desa Dandang dan Buangin, Kec. Sabbang?

C. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Pembahasan

Penelitian ini berjudul “Efektifitas Peran Pemerintah Daerah Luwu Utara terhadap Penyelesaian Konflik Antar Pemuda di Desa Dandang dan Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Studi Analisis Komunikator). Berdasarkan judul tersebut, maka secara operasional penelitian ini didefinisikan sebagai tindakan pengungkapan informasi tentang kemampuan komunikator pemerintah daerah Luwu Utara dalam mempengaruhi situasi yang terjadi pada konflik antar pemuda di Desa Dandang dan Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan judul penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi:

- a) Pemerintah daerah Luwu Utara;
- b) Konflik Desa Dandang dengan Desa Buangin.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui peranan Pemerintah daerah Luwu Utara terhadap penyelesaian konflik di Desa Dandang-Buangin Kec. Sabbang;
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Luwu Utara dalam rangka penyelesaian konflik di Desa Dandang-Buangin, Kec. Sabbang.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah daerah Luwu Utara dalam menyelesaikan konflik di Desa Dandang-Buangin, Kec. Sabbang.

E. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam memperkaya literatur ilmu komunikasi sehingga dapat menjadi bahan bacaan bagi semua pihak, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran komunikasi dalam kehidupan manusia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, baik bagi para akademisi, politisi, mahasiswa, masyarakat, khususnya Pemerintah Daerah Kab. Luwu Utara dalam upaya penyelesaian konflik di Desa Dandang dan Buangin, serta konflik-konflik lainnya.

F. *Garis – Garis Besar Isi Skripsi*

Sebagai karya ilmiah, skripsi ini di mulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta garis – garis besar isi skripsi.

Pada bab kedua kajian pustaka yang mencakup tentang penelitian terdahulu yang relevan, teori – teori dasar tentang komunikasi, tinjauan tentang komunikator, tinjauan tentang konflik, Pemerintah Daerah dan penanganan konflik masyarakat, dan kerangka pikir.

Selanjutnya pada bab ketiga membahas metode penelitian yang mencakup tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Rancangan pembahasan pada bab empat ini akan dimulai dengan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, peran dan upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik, kendala dalam penyelesaian konflik, kemudian pembahasan hasil penelitian.

Pada bab terakhir sebagai bab penutup berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Efektifitas Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Konflik Antarpemuda di Desa Dandang dan Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Studi Analisis Komunikator).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang konflik yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Syaifuddin Iskandar Ardiansyah, *Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik*, tahun 2010.¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah objek kajian yang sama, yaitu konflik yang terjadi antara dua kelompok masyarakat. Perbedaan yang paling mendasar adalah pendekatannya. Penelitian di atas meninjau konflik dari aspek sosial politik sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah aspek komunikasi dalam hal ini kemampuan komunikator dalam penanganan konflik.

2. M. Munandar Sulaeman, *Dasar-Dasar Konflik dan Model Resolusi Konflik pada Masyarakat Desa Pantura Jabar*, tahun 2010.²

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah persoalan konflik kelompok-kelompok masyarakat. Perbedaannya terletak pada pokok kajiannya. Pada penelitian di atas, pokok kajian yang dilakukan adalah

¹Syarifuddin Iskandar Ardiansyah, *Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik*, (Sumbawa Besar: FISIP Universitas Samawa, 2010), h. i.

²M. Munandar Sulaeman, *Dasar-Dasar Konflik dan Model Resolusi Konflik pada Masyarakat Desa Pantura Jabar*, (Padjajaran: Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, *Sosiohumaniora*, Vol. 12, No. 2, Juli 2010), h. 175.

penyebab dan upaya resolusi konflik, sedangkan penelitian ini akan memfokuskan pada peran komunikasi pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik.

3. Deri Lafari, *Peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam Mengatasi Konflik Tanah Ulayat Tahun 2011 (Studi Kasus Masyarakat Desa Tandun Kecamatan Tandun dengan PT Perkebunan Nusantara V Sei Tapung)*, tahun 2011.³

Penelitian di atas memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan tersebut terletak pada peran pemerintah daerah dalam menangani sebuah konflik yang terjadi di daerah pemerintahannya. Perbedaannya terletak pada objek kajian serta tujuan penelitian. Penelitian di atas bertujuan untuk mengetahui penyebab konflik dan peran pemerintah daerah dalam penyelesaiannya, sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian konflik ditinjau dari perspektif komunikasi.

4. Yusuf Hasani, *Efektivitas Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat di Maluku Utara*, tahun 2004.⁴

Penelitian di atas pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu peran komunikasi dalam penyelesaian konflik. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Penelitian di atas mengkaji peran komunikasi pemuka

³Deri Lafari, *Peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam Mengatasi Konflik Tanah Ulayat Tahun 2011: Studi Kasus Masyarakat Desa Tandun Kecamatan Tandun dengan PT Perkebunan Nusantara V Sei Tapung*, (Riau, Fakultas Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeritas Riau, 2010), h. 1.

⁴Yusuf Hasani, *Efektivitas Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat di Maluku Utara*, (Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2004), h. i.

pendapat dalam penyelesaian konflik sedangkan dalam penelitian penulis peran komunikasi pemerintah daerah.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penelitian tentang konflik telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun secara khusus penelitian tentang konflik sosial yang terjadi di Desa Dandang dan Buangin, sejauh pengamatan penulis belum pernah dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki nilai originalitas. Di samping itu, penelitian tentang konflik dalam perspektif ilmu komunikasi tergolong masih minim terutama menyangkut kemampuan komunikasi pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian konflik. Dengan demikian, penelitian mengenai konflik sosial dalam perspektif komunikasi ini dipandang perlu untuk dilakukan.

B. Teori-Teori Dasar tentang Komunikasi

Istilah komunikasi (bahasa Inggris; *communication*) mempunyai banyak arti. Asal katanya (etimologi), istilah komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu *communis*, yang berarti sama (*common*). Dari kata *communis* berubah menjadi kata kerja *communicare*, yang berarti menyebarkan atau memberitahukan. Jadi menurut asal katanya, komunikasi berarti “menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama”.⁵

⁵Tommy Suprpto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Cet. I; Yogyakarta: Caps, 2011), h.7.

Apa yang dikemukakan di atas sama seperti yang dikatakan oleh Vietzal Rivai bahwa “komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengiriman kepada penerima informasi”.⁶ Dengan demikian penerima informasi harus memahami isi informasi yang diterimanya, sebaliknya apabila *receiver* tidak memahami informasi yang diberikan oleh *sender*, berarti tidak terjadi komunikasi efektif yang pada akhirnya dapat menimbulkan suatu konflik. Menurut Hovland, Janis dan Kelley “komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain”.⁷

Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang komunikator kepada komunikan atau pengirim pesan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian.

Dalam garis besarnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila sekiranya timbul saling pengertian, yaitu jika kedua belah pihak dapat memahaminya.⁸

⁶Veitzal Rivai, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 350.

⁷Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), h. 2.

⁸H. A.W. Widjaja, *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 15.

Salah satu definisi singkat dibuat oleh Harold D. Lasswell bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya”. Paradigma Lasswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni:

1. Komunikator (*communicator, sender, source*) adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi;
2. Pesan (*message*) adalah pernyataan yang didukung oleh lambing, bahasa, gambar dan sebagainya;
3. Media (*channel, media*) adalah sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikasi jauh tempatnya atau banyak jumlahnya, maka diperlukan media sebagai penyampai pesan;
4. Komunikan (*communicant, communicate, receiver, recipient*) adalah orang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan komunikator;
5. Efek (*effect, impact, influence*) adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan.

Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.⁹

⁹Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Cet. XIX; Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 10.

Menurut Suranto AW, komunikasi dikatakan efektif apabila dalam suatu proses komunikasi itu, pesan yang disampaikan seorang komunikator dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan, persis seperti yang dikehendaki oleh komunikator. Dengan demikian, dalam “komunikasi itu komunikator berhasil menyampaikan pesan yang dimaksudkannya, sedang komunikan berhasil menerima dan memahaminya”.¹⁰

Efektifnya sebuah komunikasi adalah jika pesan yang dikirim memberikan pengaruh terhadap komunikan, artinya bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik sehingga menimbulkan respon atau umpan balik dari penerimanya. Seperti contohnya; adanya tindakan, hubungan yang makin baik dan pengaruh pada sikap.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antara satu individu dengan individu yang lain, untuk itu dari masing-masing individu diharapkan memiliki kemampuan serta keterampilan yang dibutuhkan dalam proses komunikasi.

1. Kemampuan dalam menyampaikan pesan

Untuk dapat mempengaruhi komunikan secara efektif, penyampaian pesan perlu memperhatikan langkah-langkah:

a. *Attention* (perhatian) Artinya bahwa pesannya harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan perhatian dari komunikan. Misalnya seorang pimpinan memulai dahulu dengan mengajak

¹⁰Suranto AW, *Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Perkantoran*, (online: www.uny.ac.id, 07 Oktober 2013), h. 2.

berbincang-bincang secara santai dengan karyawan, tersenyum, menanyakan kesehatan, dan sebagainya sebagai cara untuk menarik perhatian.

b. *Need* (kebutuhan) Artinya bahwa komunikator kemudian berusaha meyakinkan komunikan bahwa pesan yang disampaikan itu penting bagi komunikan.

c. *Satisfaction* (pemuasan), dalam hal ini komunikator memberikan bukti bahwa yang di-sampaikan adalah benar.

d. *Visualization* (visualisasi) komunikator memberikan bukti- bukti lebih konkret sehingga komunikan bisa turut menyaksikan.

e. *Action* (tindakan), komunikator mendorong agar komunikan bertindak positif yaitu melaksanakan pesan dari komunikator tersebut.¹¹

Kunci utama dari komunikasi adalah dari seorang komunikator. Untuk itu calon komunikator dituntut untuk mampu menyampaikan pesan sesuai dengan keinginan komunikan, artinya bahwa dalam proses komunikasi dibutuhkan adanya sikap menghargai orang lain, serta ikut dalam suasana yang sedang dialami orang lain (empati), sehingga dengan adanya sikap semacam itu proses komunikasi akan lebih mudah tercapai.

2. Kemampuan dalam menerima pesan (mendengarkan)

Seringkali bahwa sesuatu yang diungkapkan tidak selalu dimengerti oleh orang lain, bahkan bisa menimbulkan sebuah kesalahpahaman untuk itulah agar

¹¹*Ibid.*, h. 3.

informasi dapat diterima dengan baik sehingga menimbulkan umpan balik perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:

Mendengarkan terdiri dari sejumlah dimensi-dimensi:

- a. Sepenuhnya memperhatikan pengirim pesan;
- b. Mendengarkan secara aktif berita/informasi yang disampaikan;
- c. Bila perlu mintalah penegasan atau pengulangan;
- d. Tetap bekerja sama dengan pengirim.¹²

3. Kemampuan dalam memberikan umpan balik

Umpan balik sangat penting dalam komunikasi, karena seseorang bisa mengetahui informasi atau pesan yang telah disampaikan itu sampai sesuai dengan keinginan komunikator. Menurut Masyhuri HP dalam buku *Asas-asas Komunikasi*, bahwa umpan balik adalah informasi tentang keberhasilan penerima dalam menangkap pesan yang disampaikan oleh sumber sebagai kontrol efektivitas tindakan komunikator dan untuk pedoman bagi tindakan selanjutnya.¹³ Dengan demikian ukuran dari efektivitas komunikasi adalah dengan adanya umpan balik, yakni pemberian tanggapan terhadap komunikator.

Adapun respon atau tanggapan dari komunikasi dibedakan sebagai berikut:

- a. Respon langsung (*direct respon*), ialah respon yang diberikan langsung oleh pihak komunikan tidak memerlukan jangka waktu yang relatif lama;

¹²Ron Ludlow dan Fergus Panton, *Komunikasi Efektif*, (Cet. I; Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 2006), h. 17.

¹³Masyhuri HP, *Asas-Asas Komunikasi*, (Cet. I; Semarang: IKIP Semarang Press, 1991), h. 50.

- b. Respon tidak langsung (*indirect respon*) ialah respon yang memerlukan jangka waktu. Dalam hal ini respon yang diberikan oleh pihak komunikan tertunda beberapa saat;
- c. Respon yang kurang dimengerti (*zero respon*), ialah respon yang tidak dapat dimengerti oleh pihak komunikator;
- d. Respon yang dapat dimengerti (*positive respon*), ialah respon yang diberikan oleh pihak komunikan dapat dimengerti oleh pihak komunikator dengan pihak komunikan terdapat saling pengertian;
- e. Respon yang bersifat netral, ialah respon pihak komunikan yang tidak memberikan dukungan ataupun menentangnya;
- f. Respon yang berifat negatif, ialah respon yang diberikan oleh pihak komunikan tidak memberikan dukungan kepada pihak komunikator.¹⁴

Umpan balik adalah “setiap pesan verbal atau non verbal yang dikirimkan kembali kepada sumber yang berhubungan dengan pesan sumber”.¹⁵ Jadi komunikasi akan lebih efektif jika memberikan pengaruh bagi penerimanya, yakni adanya timbal balik.

4. Keterampilan dalam berkomunikasi

Menurut Masyhuri HP, agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar, semua pihak yang berkomunikasi harus memiliki keterampilan dalam berfikir. Di samping

¹⁴Wursanto, *op.cit.*, h.155.

¹⁵Daw B. Curtis, James J. Floyd, Jerry L Winsor, *Komunikasi Bisnis dan Professional*, (Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 7.

itu sumber harus memiliki keterampilan menjadi pesan, ialah mengubah gagasan atau pesan menjadi lambang-lambang, sedang penerima harus memiliki keterampilan membuka sandi, ialah menterjemahkan lambang-lambang tersebut, agar pesan yang terkandung dalam lambang-lambang itu dapat dipahami.¹⁶

Untuk mendukung agar komunikasi lebih baik, maka diperlukan adanya keterampilan dari masing-masing individu. Kemampuan berkomunikasi dapat ditingkatkan dengan “mengembangkan suatu atmosfer komunikasi yang positif demi keberhasilan pada masa mendatang”.¹⁷

Adapun proses komunikasi menurut Onong terbagi atas dua tahap, yakni secara primer dan secara sekunder.

1. Proses Komunikasi Secara Primer

Adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambing sebagai media. Lambing ini umumnya bahasa tetapi dalam situasi komunikasi tertentu lambing-lambang yang digunakan dapat berupa gerak tubuh, gambar, warna dan sebagainya.

2. Proses Komunikasi Secara Sekunder

Adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Proses ini termasuk sambungan dari proses primer untuk

¹⁶Masyhuri HP, *op.cit*, h. 24.

¹⁷Daw B Curtis, et.al., *op.cit*, h. 7.

menembus dimensi ruang dan waktu, dalam prosesnya komunikasi sekunder ini akan semakin efektif dan efisien karena didukung oleh teknologi komunikasi yang semakin canggih, yang ditopang oleh teknologi-teknologi lainnya.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi dalam interaksi sosial sama pentingnya dengan bernafas bagi seorang manusia. Keberadaan komunikasi sebagai bagian dalam kehidupan manusia memiliki beberapa tujuan tertentu. Menurut Devito, ada empat tujuan komunikasi yang perlu dikemukakan yakni:

1. Untuk Menemukan

Salah satu tujuan utama komunikasi adalah penemuan diri (*personal discovery*). Bila anda berkomunikasi dengan orang lain, anda belajar mengenai diri sendiri selain juga tentang orang lain. Dengan berbicara tentang diri sendiri dengan orang lain, Anda memperoleh umpan balik yang berharga mengenai perasaan, pemikiran, dan perilaku Anda. Cara lain untuk melakukan penemuan diri melalui proses perbandingan sosial, melalui perbandingan kemampuan, prestasi, sikap, pendapat, nilai, dan kegagalan kita dengan orang lain.

2. Untuk Berhubungan

Salah satu motivasi yang paling kuat adalah berhubungan dengan orang lain, membina dan memelihara dengan orang lain. Seseorang ingin merasa dicintai dan disukai dan juga ingin mencintai dan menyukai orang lain. Seseorang menghabiskan

¹⁸Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 11.

banyak waktu dan energi komunikasi dalam membina dan memelihara hubungan sosial.

3. Untuk Meyakinkan

Seseorang menghabiskan banyak waktu untuk melakukan persuasi antarpribadi, baik sebagai sumber maupun sebagai penerima. Dalam perjumpaan antarpribadi sehari-hari, kita berusaha untuk merubah sikap dan perilaku orang lain, berusaha untuk mengajak mereka melakukan sesuatu.

4. Untuk Bermain

Seseorang menggunakan banyak perilaku komunikasi untuk bermain dan menghibur diri. Demikian pula banyak dari perilaku komunikasi dirancang untuk memberikan hiburan pada orang lain. Adakalanya hiburan ini merupakan tujuan akhir, tetapi adakalanya ini merupakan untuk mengikat perhatian orang lain sehingga kita dapat mencapai tujuan-tujuan lain.¹⁹

Jadi, secara keseluruhan dapat dipahami bahwa tujuan dari komunikasi tidak terlepas dari bagaimana manusia mengisi hidupnya dalam pola interaksi sosial yang tercipta antara satu dengan lainnya, baik untuk aktualisasi diri, interaksi, eksistensi, ekspresi, apresiasi maupun menciptakan esensi dalam hidupnya.

C. Tinjauan tentang Komunikator

¹⁹Joseph A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia*, (Edisi V; Jakarta: Proffesionals Books, 1997), h. 30.

Dalam komunikasi, setiap orang atau kelompok dapat menyampaikan pesan-pesan komunikasi itu sebagai suatu proses di mana komunikator dapat menjadi komunikan, sebaliknya komunikan dapat menjadi komunikator. Seorang komunikator harus memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Penampilan: khusus dalam komunikasi tatap muka atau yang menggunakan media pandang dengan audio visual, seorang komunikator harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan komunikan. Penampilan ini sesuai dengan tata karma dengan memperhatikan keadaan, waktu, dan tempat.

2. Penguasaan masalah: seseorang yang tampil atau ditampilkan sebagai komunikator haruslah betul-betul menguasai masalahnya. Apabila tidak, maka setelah proses komunikasi berlangsung akan menimbulkan efek ketidakpercayaan terhadap komunikator dan akhirnya terhadap pesan itu sendiri yang akan menghambat terhadap efektifitas komunikasi. Dalam suatu proses komunikasi timbale balik, yang lebih menguasai masalah akan cenderung memenangkan tujuan komunikasi.

3. Penguasaan bahasa: komunikator harus menguasai bahasa dengan baik. Bahasa ini adalah bahasa yang digunakan dan dapat dipahami oleh komunikan, komunikator mutlak menguasai istilah-istilah umum yang digunakan oleh lingkungan tertentu atau khusus. Penguasaan bahasa akan sangat membantu menjelaskan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada audiens itu. Tanpa penguasaan bahasa

secara baik dapat menimbulkan kesalahpafsiran ataupun menimbulkan ketidakpercayaan terhadap komunikator.²⁰

Fungsi komunikator adalah pengutaraan pikiran dan perasaannya dalam bentuk pesan untuk membuat komunikan menjadi tahu atau berubah sikap, pendapat atau perilakunya. Komunikan yang dijadikan sasaran akan mengkaji siapa komunikator yang menyampaikan informasi itu. Oleh sebab itu, seorang komunikator harus memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Etos komunikator

Keefektifan komunikasi ditentukan oleh etos komunikator. Etos adalah nilai dari seorang yang merupakan paduan dari kognisi, afeksi, dan konasi. Kognisi adalah proses memahami yang bersangkutan dengan pikiran. Afeksi adalah perasaan yang ditimbulkan oleh perangsang dari luar, sedangkan konasi adalah aspek psikologis yang berkaitan dengan upaya atau perjuangan.

Etos tidak timbul pada seseorang dengan begitu, tetapi ada faktor-faktor tertentu yang mendukungnya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kesiapan: seorang komunikator yang tampil di mimbar harus menunjukkan kepada khalayak bahwa ia muncul di depan forum dengan persiapan yang matang. Kesiapan ini akan tampak pada gaya komunikasinya yang meyakinkan. Tampak oleh komunikan penguasaan komunikator mengenai materi yang dibahas. Pidato dengan persiapan yang matang kecil kemungkinan akan gagal.

²⁰Sri Nawangsari, *Seri Diktat Kuliah: Komunikasi Bisnis*, (Depok: Universitas Gunadarma, t.th.), h. 38-39.

- b. Kesungguhan:** seorang komunikator yang berbicara dan membahas suatu topik dengan menunjukkan kesungguhan akan menimbulkan kepercayaan pihak komunikan kepadanya.
- c. Ketulusan:** seorang komunikator harus membawakan kesan kepada khalayak bahwa ia berhati tulus dalam niat dan perbuatannya. Ia harus hati-hati untuk menghindarkan kata-kata yang mengarah pada kecurigaan terhadap ketidaktulusan komunikator. Cara terbaik bagi seorang komunikator ialah menumbuhkan faktor pendukung etos tersebut dengan kemampuan memproyeksikan kualitas ini kepada khalayak.
- d. Kepercayaan:** seorang komunikator harus senantiasa memancarkan kepastian. Ini harus muncul dengan penguasaan diri dan situasi secara sempurna. Ia harus selamanya siap menghadapi segala situasi.
- e. Ketenangan:** khalayak cenderung akan menaruh kepercayaan kepada komunikator yang tenang dalam penampilan dan tenang dalam mengutarakan kata-kata. Ketenangan itu perlu dipelihara dan selalu ditunjukkan pada setiap peristiwa komunikasi menghadapi khalayak. Ketenangan yang ditunjukkan seorang komunikator akan menimbulkan kesan pada komunikan bahwa komunikator merupakan orang yang sudah berpengalaman dalam menghadapi khalayak dan menguasai persoalan yang akan dibicarakan.
- f. Keramahan:** keramahan komunikator akan menimbulkan rasa simpatik komunikan kepadanya. Keramahan tidak berarti kelemahan tetapi pengekspresian sikap etis.

Sikap hormat komunikator dalam memberikan jawaban akan meluluhkan sikap emosional pengkritik dan akan menimbulkan rasa simpati kepada komunikator. Jadi keramahan tidak saja ditunjukkan dengan ekspresi wajah tetapi juga dengan gaya dan cara pengutarakan paduan pikiran dan perasaannya.

g. Kesederhanaan: kesederhanaan tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat fisik tetapi juga dalam hal penggunaan bahasa sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaan dan dalam gaya mengkomunikasikannya. Kesederhanaan seringkali menunjukkan keaslian dan kemurnian sikap. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dijumpai komunikator yang meniru gaya orang lain. Peniruan seperti ini justru akan mengurangi penilaian positif dari pihak komunikan.²¹

2. Sikap komunikator

Sikap (*attitude*) adalah suatu kesiapan kegiatan, suatu kecenderungan pada diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan menuju atau menjauhi nilai-nilai social. Dalam hubungannya dengan kegiatan komunikasi yang melibatkan manusia-manusia sebagai sasarannya, pada diri komunikator terdapat lima jenis sikap, yaitu:

a. Reseptif (*receptive*): sikap reseptif berarti bersedia untuk menerima gagasan dari orang lain, dari staf pimpinan, karyawan, teman, dan lain-lain. Bagi komunikator tidak akan ada ruginya untuk menerima gagasan dari orang lain sebab tidak jarang sebuah gagasan yang semula dinilai buruk dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu gagasan yang bermanfaat.

²¹*Ibid.*, h. 39-41.

- b.** Selektif (*selective*): seperti halnya dengan faktor reseptif, faktor selektif pun penting bagi komunikator dalam peranannya selaku komunikan, sebagai persiapan untuk menjadi komunikator yang baik. Jadi untuk menjadi komunikator yang baik ia harus menjadi komunikan yang terampil. Tetapi dalam menerima pesan dari orang lain dalam bentuk gagasan atau informasi ia harus selektif dalam rangka pembinaan profesinya untuk diabdikan kepada masyarakat.
- c.** Dijestif (*digestive*): yang dimaksud dengan dijestif di sini adalah kemampuan komunikator dalam merencanakan gagasan atau informasi dari orang lain sebagai bahan bagi pesan yang akan ia komunikasikan. Ia mampu melihat intinya yang hakiki seraya dapat melakukan prediksi akibat dari pengaruh gagasan atau informasi tadi.
- d.** Asimilatif (*assimilative*): asimilatif berarti kemampuan komunikator dalam mengkorelasikan gagasan atau informasi yang ia terima dari orang lain secara sistematis dengan apa yang telah ia miliki dalam benaknya yang merupakan hasil pendidikan dan pengalamannya. Formulasi dari perpaduan kedua aspek tersebut dikembangkan sehingga menjadi konsep, suatu bahan untuk dikomunikasikan.
- e.** Transmisif (*transmissive*): transmisif mengandung makna kemampuan komunikator dalam mentransmisikan konsep yang telah ia formulasikan secara kognitif, afektif dan konatif kepada orang lain. Dengan kata lain, ia mampu memilih kata-kata yang fungsional, mampu menyusun kalimat secara logis, mampu memilih

waktu yang tepat sehingga komunikasi yang ia lancarkan menimbulkan dampak yang ia harapkan.²²

Demikianlah lima faktor yang merupakan unsure penting bagi sikap seseorang dalam rangka pembinaan dirinya menjadi komunikator. Dari paparan tersebut, jelas bahwa untuk menjadi komunikator yang baik harus menjadi komunikan yang baik.

D. Tinjauan tentang Konflik

Konflik merupakan kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya bisa diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat.²³

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih

²²*ibid.*, h. 41-42.

²³Fisher, dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*, (Jakarta: The British Council, 2001), h. 4.

ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak.²⁴

Secara etimologi, konflik (*conflict*) berasal dari bahasa latin *configere* yang berarti saling memukul. Menurut Antonius, dkk, konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi.²⁵ Hal ini sejalan dengan pendapat Morton Deutsch, seorang pionir pendidikan resolusi konflik yang menyatakan bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipengaruhi oleh perbedaan daripada oleh persamaan.²⁶ Sedangkan menurut Scannell konflik adalah suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.²⁷

Hugh Miall mendefinisikan konflik sebagai aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindari dalam proses perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru

²⁴Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 1-2.

²⁵Atosokhi Gea Antonius, dkk, *Relasi dengan Sesama*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), h. 175.

²⁶Bunyamin Maftuh, *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2005), h. 47.

²⁷Mary Scannell, *The Big Book of Conflict Resolution Games*, (United States of America: McGraw-Hill Companies, Inc., 2010), h. 2.

yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.²⁸

Menurut Webster dalam Pruitt, dkk., bahwa istilah konflik adalah suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yakni berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi kemudian berkebang dengan masuknya ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide-ide dan lain-lain.²⁹ Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi atau karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam itu terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap.³⁰ Ketika terjadi suatu konflik dalam suatu masyarakat proses konsiliasi perlu di pertimbangkan jangan sampai terjadi kekerasan yang dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik.

Menurut Dwipayana, dkk., menjelaskan tiga bentuk konflik yakni (a) Konflik Horizontal merupakan bentuk konflik yang terjadi dikalangan warga masyarakat, baik dalam skala kecil maupun skala besar; (b) konflik vertikal yakni bentuk konflik antara warga masyarakat dengan pemerintah baik dalam skala kecil maupun skala

²⁸Hugh Miall, Oliver Ramsbotham, & Tom Woodhouse, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Terj. Tri Budhi Satrio, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 7-8.

²⁹Pruitt G. Dean dan Jeffrey Z. Rubbin, *Teori Konflik Sosial Seri Psikologi Sosial*, (Cet. V; Alih Bahasa Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 9-10.

³⁰*Ibid.*, h. 27.

besar; (c) konflik multidimensi yaitu konflik yang bersifat tumpang tindih antara dimensi horizontal dan vertikal.³¹

Sejalan dengan teoritis konflik pada umumnya yang berlawanan dengan pendirian teori fungsionalisme struktural. Dahrendorf memandang masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Setiap elemen-elemen yang ada dalam masyarakat memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Sehingga selalu terdapat konflik dan pertikaian dalam sistem sosial. Kekuasaan mempunyai peran sentral dalam mempertahankan ketertiban masyarakat. Keteraturan yang ada merupakan paksaan pihak yang berkuasa kepada pihak yang dikuasai.

Menurut Dahrendorf masyarakat mempunyai sisi ganda, konflik dan konsensus yang menjadi persyaratan satu sama lain. Tidak akan ada konflik kecuali ada konsensus. Konflik tidak akan lahir tanpa adanya konsensus sebelumnya. Konsep konsensus menurut teori konflik merupakan ketidakbebasan yang dipaksakan, bukan hasrat untuk stabil sebagaimana menurut teori fungsionalisme. Dalam hal ini posisi sekelompok orang dalam struktur sosial menentukan otoritas terhadap kelompok lainnya (otoritas berada di dalam posisi). Kepentingan dikategorikan Dahrendorf menjadi kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata.³²

³¹ A. A. GN Ari Dwipayana, dkk, *Merajut Modal Sosial untuk Perdamaian dan Integrasi Sosial*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2001), h. 10.

³²Susan Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h. 49.

Sebagai sebuah fakta sosial, konflik dapat terjadi karena berbagai macam sebab. Sebab-sebab terjadinya konflik antara lain:

1) *Komunikasi*: salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap.

2) *Struktur*: pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumberdaya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.

3) *Pribadi*: ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi. Konflik sering kali merupakan salah satu strategi para pemimpin untuk melakukan perubahan. Jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan menciptakan konflik. Pemimpin menggunakan faktor- faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan.³³

Akan tetapi, konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi obyektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berikut ini adalah kondisi obyektif yang bisa menimbulkan konflik:

1) Tujuan yang berbeda dikemukakan oleh Hocker dan Wilmot, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda.

³³Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Quills, 2006), h. 29.

2) Komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik seringkali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor komunikasi yang menyebabkan konflik misalnya, distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi.

3) Beragam karakteristik sosial, konflik dimasyarakat sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam; suku, agama, dan ideologi. Karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain yang sering menimbulkan konflik.

4) Pribadi orang, dalam hal ini konflik terjadi karena adanya sikap curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri.

5) Kebutuhan, orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia. Jika kebutuhan orang terhambat, maka bisa memicu terjadinya konflik.³⁴

Dalam pandangan di atas, konflik merupakan sesuatu yang sangat potensial terjadi dalam kehidupan manusia, baik yang sifatnya intrapersonal maupun interpersonal, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau bahkan antara masyarakat dengan negara. Terjadinya konflik

³⁴Wirawan, *op.cit.*, h. 7-13.

merupakan salah satu bentuk perubahan sosial sehingga konflik tersebut sifatnya berubah-ubah melalui tahap aktivitas, intensitas, kekerasan dan ketegangan yang berbeda-beda.

Ada beberapa tahapan yang ditemukan oleh Fisher dkk untuk menganalisa situasi konflik dalam masyarakat, yaitu:

a) Pra-konflik: yang merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersebut dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain.

b) Konfrontasi: pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.

c) Krisis: ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Komunikasi normal diantara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.

d) Akibat: kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian, dan pada tahap ini terdapat kemungkinan penyelesaian masalah.

e) Pasca-konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai kofrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi menjadi situasi pra-konflik.³⁵

Atas gambaran di atas, maka sebagai sesuatu yang sifatnya potensial terjadi dan dapat menciptakan situasi yang tidak stabil dalam masyarakat, maka konflik harus dihindari sejak dini terutama jika konflik tersebut melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Jika konflik telah terjadi, maka upaya penyelesaian harus segera dilakukan agar tidak membawa dampak yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat.

Ketika menghadapi situasi konflik, orang berperilaku tertentu untuk menghadapi lawannya. Perilaku mereka membentuk satu pola atau beberapa pola tertentu. Pola perilaku orang-orang dalam menghadapi situasi konflik disebut sebagai gaya manajemen konflik.³⁶ Manajemen konflik sebagaimana dimaksud digambarkan sebagai berikut:

1) Koersi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain yang lebih lemah. Misalnya, sistem pemerintahan totalitarian;

³⁵Fisher, dkk., *op.cit.*, h. 19-20.

³⁶Wirawan, *op.cit.*, h. 134.

2) Kompromi, yaitu suatu bentuk akomodasi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Misalnya, perjanjian gencatan senjata antara dua Negara;

3) Arbitrasi, yaitu terjadi apabila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri. Misalnya, penyelesaian pertentangan antara karyawan dan pengusaha dengan serikat buruh, serta Departemen Tenaga Kerja sebagai pihak ketiga;

4) Mediasi, seperti arbitrasi namun pihak ketiga hanya penengah atau juru damai. Misalnya, mediasi pemerintah RI untuk mendamaikan fraksi-fraksi yang berselisih di Kamboja;

5) Konsiliasi, merupakan upaya mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Misalnya, panitia tetap menyelesaikan masalah ketenagakerjaan mengundang perusahaan dan wakil karyawan untuk menyelesaikan pemogokan;

6) Toleransi, yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang resmi;

7) Stalemate, terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang. Kemudian keduanya sadar untuk mengakhiri pertentangan. Misalnya, persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur;

8) Ajudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pengadilan. Misalnya, persengketaan tanah warisan keluarga yang diselesaikan di pengadilan.³⁷

³⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 84.

Berdasarkan pendapat Soerjono tersebut, maka dalam kaitannya dengan pengaruh pemerintah daerah dalam penanganan konflik di Desa Dandang dan Buangin secara khusus dan wilayah Luwu Utara pada umumnya, pendekatan yang dapat dilakukan melalui komunikasi persuasif adalah dengan memediasi pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Di sini, peran seorang komunikator yang baik sangat dibutuhkan sehingga proses mediasi yang berlangsung dapat diterima oleh semua pihak dengan sadar dan penuh rasa tanggungjawab.

E. Pemerintah Daerah dan Penanganan Konflik Masyarakat

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dengan jelas ditegaskan bahwa salah satu tugas pemerintah daerah adalah melakukan penanganan konflik yang meliputi pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik.³⁸ Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan. Melalui terbitnya Inpres ini, diharapkan bahwa kepala daerah tidak lagi ragu untuk bertindak mengatasi konflik komunal di daerahnya. Kepala daerah harus pula mampu menyelesaikan konflik antaranggota masyarakat.³⁹

Dalam Pasal 27 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain disebutkan kewajiban dari kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah terkait

³⁸Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 4, h. 5.

³⁹Prayudi, *Peranan Kepala Daerah dalam Penanganan Gangguan Keamanan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. V, No. 06/II/P3DI/Maret/2013), h. 17.

ketenteraman dan ketertiban masyarakat (huruf b). UU No. 32 Tahun 2004 juga menegaskan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, terkecuali bagi urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah, di mana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; (f) agama. UU No. 32 Tahun 2004 juga menegaskan tentang kewenangan pemerintah pusat di luar urusan pemerintahan tadi yang dapat:

- a) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- b) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat;
- c) Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 25 dari UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan: “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang, antara lain terkait melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini jelas dapat membuka ruang untuk diinterpretasikan secara luas, termasuk tugas dan kewenangannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Inpres No. 2 Tahun 2013 terkait penanganan gangguan keamanan.

Dalam perspektif perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam upaya penanganan konflik yang terjadi di daerah. Oleh sebab itu, upaya menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Luwu Utara, khususnya di Desa Dandang dan Buangin merupakan upaya sinergis antara seluruh elemen yang ada, terutama pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat.

Secara rinci, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut:

Ruang lingkup penanganan konflik meliputi:

- a. Pencegahan konflik;
- b. Penghentian konflik; dan
- c. Pemulihan Pascakonflik.

Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:

- 1) Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- 2) Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- 3) Meredam potensi konflik; dan
- 4) Membangun sistem peringatan dini.

Pencegahan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Selain itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat dengan:

- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;
- d. Mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- f. Membangun karakter bangsa;
- g. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Pemerintah juga bertanggungjawab untuk membangun sistem peringatan dini melalui media komunikasi dengan cara:

- a. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik;
- b. Penyampaian data dan informasi mengenai konflik secara cepat dan akurat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
- e. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghentian konflik dilakukan melalui:

- a. Penghentian kekerasan fisik;
- b. Penetapan Status Keadaan Konflik;

- c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat, serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud meliputi rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi. Rekonsiliasi antara para pihak dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi, dan/atau pemaafan. Proses rekonsiliasi dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Pelaksanaan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak konflik, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Pelaksanaan rehabilitasi meliputi pemulihan psikologis korban konflik dan perlindungan kelompok rentan; pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian; penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat; penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat; pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan; pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; pemenuhan kebutuhan dan pelayanan

kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan; peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Pelaksanaan rekonstruksi meliputi:

- a. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
- b. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
- c. Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah konflik;
- d. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
- e. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- f. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.⁴⁰

Dari pemaparan di atas, jelas bahwa penanganan konflik baik pencegahan, penghentian, maupun penanganan pasca konflik merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan kepolisian, TNI serta pemangku-pemangku kepentingan lainnya, termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan lain-lain.

F. Kerangka Pikir

⁴⁰Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 4, h. 6-18.

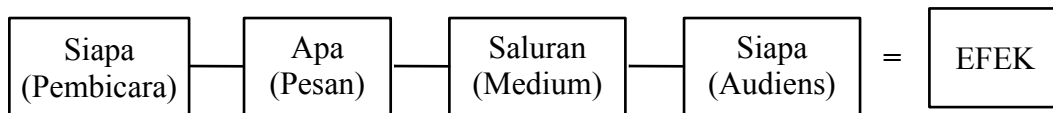
Dalam kehidupan manusia, komunikasi memiliki peran sentral bagi keberlangsungan, keberdayaan, esensi dan eksistensi manusia. Melalui komunikasi manusia dapat mengekspresikan dan mengapresiasi dirinya dalam lingkup interaksi sosial dengan sesamanya. Tanpa komunikasi, manusia tidak dapat menginterpretasikan kehendak dirinya dan kebutuhan hidupnya dengan orang lain.

Demikian pula dengan konflik. Konflik dalam kehidupan manusia adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Pada dasarnya, konflik dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horisontal dan vertikal, di mana keduanya sama-sama besarnya berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian dalam lingkungan masyarakat. Konflik antar kelompok pemuda di Desa Dandang dan Buangin merupakan salah satu bentuk konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.

Pemerintah termasuk pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di wilayah masing-masing. Tidak hanya penyelesaian konflik, tiga peran utama yang harus dijalankan oleh pemerintah adalah pencegahan, penghentian konflik; dan pemulihan pasca konflik. Tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan

dengan berpegang teguh pada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu poin penting dalam upaya penanganan konflik adalah melakukan komunikasi secara persuasif dengan semua pihak terutama yang terlibat dalam konflik.

Dalam konteks penelitian ini, komunikasi efektif seorang komunikator menjadi fokus penelitian yakni melihat lebih dalam mengenai proses komunikasi pemerintah daerah Luwu Utara dalam rangka memediasi, memfasilitasi, serta mengkonsolidasikan setiap elemen yang ada untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Dandang dan Buangin. Dalam penjelasan lebih sederhana, penelitian ini mencoba mengkaji efektifitas komunikasi pemerintah daerah Luwu Raya dalam mempengaruhi komunikan (objek/sasaran) baik dari aspek kognisi, sikap, dan perbuatan seseorang sekaitan dengan upaya penanganan konflik di wilayah konflik. Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori komunikasi model Laswell yang digambarkan sebagai berikut:



Dari uraian singkat di atas, maka secara skematis alur pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

**PEMERINTAH DAERAH
LUWU UTARA**
(Komunikator)

PEMANGKU KEPENTINGAN
(Masyarakat, Tokoh Masyarakat,
Pemerintah Kecamatan dan Desa,
Kepolisian, TNI, Pemuda, dan
lain-lain)

HASIL
(Penyelesaian Konflik
Dandang-Buangin)

EFEK
(Pengetahuan, sikap, dan
perbuatan)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu sebuah pendekatan di mana peneliti menggunakan logika-logika dan teori-teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena social yang terjadi. Berdasarkan jenis data yang diperoleh dalam penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka perlu diketahui lokasi dalam penelitian. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wilayah Pemerintahan Daerah Luwu Utara yaitu di Desa Dandang dan Desa Buangin Kecamatan Sabbang.

C. Subjek Penelitian

Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Luwu Utara dan Masyarakat di Desa Dandang dan Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Adapun teknik penentuan sampel sebagai sumber

informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini, sampel yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi akurat mengenai objek yang dikaji dalam penelitian.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data empirik yang diperoleh dari lapangan atau data yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber – sumber bacaan ilmiah, atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, digunakan teknik-teknik berikut:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan mengenai objek penelitian;
2. Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dengan mencatat secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, juga mengumpulkan data-data (dokumen) yang berkaitan dengan objek penelitian;
3. Wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data-data secara lebih dalam dan lengkap mengenai peran pemerintah daerah Luwu Utara dalam

mengkomunikasikan upaya penanganan konflik di Desa Dandang-Buangin, Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan teknik-teknik berikut:

1. Metode deduktif, metode atau cara mengambil kesimpulan berdasarkan dari data-data yang bersifat umum menuju hal yang khusus;
2. Metode induktif, metode atau cara penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus menuju hal yang lebih umum;
3. Metode komparatif, suatu bentuk penganalisan data dengan cara mengadakan perbandingan dari data atau pendapat para ahli tentang masalah yang berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Desa Dandang

Desa Dandang pada awalnya merupakan satu desa dengan Buangin, hingga pada tahun 1994, Desa Buangin dibagi menjadi dua yaitu Desa Buangin dan Desa Dandang. Pada saat itu, Desa Dandang dipimpin oleh H. Muin.

1. Kondisi Geografis

a. Letak dan luas wilayah

Desa Dandang merupakan salah satu dari 1 desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Sabbang yang terletak 10 km ke arah utara dari Kecamatan Sabbang. Desa dandang mempunyai Luas wilayah seluas kurang lebih 23 (Km).

b. Iklim

Iklim desa dandang, sebagai mana desa – desa lain di wilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Dandang Kecamatan Sabbang.

2. Keadaan sosial ekonomi penduduk

a. Jumlah penduduk

Desa dandang mempunyai jumlah penduduk 2.092 Jiwa, yang tersebar dalam wilayah Rw/ dusun yaitu :

- 1) Dusun Dandang I = 412 KK
- 2) Dusun dandang II = 402 KK
- 3) Dusun Salu Karondang = 432 KK
- 4) Dusun Salu Ipo = 461 KK
- 5) Dusun Panggalli = 390 KK

b. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa dandang

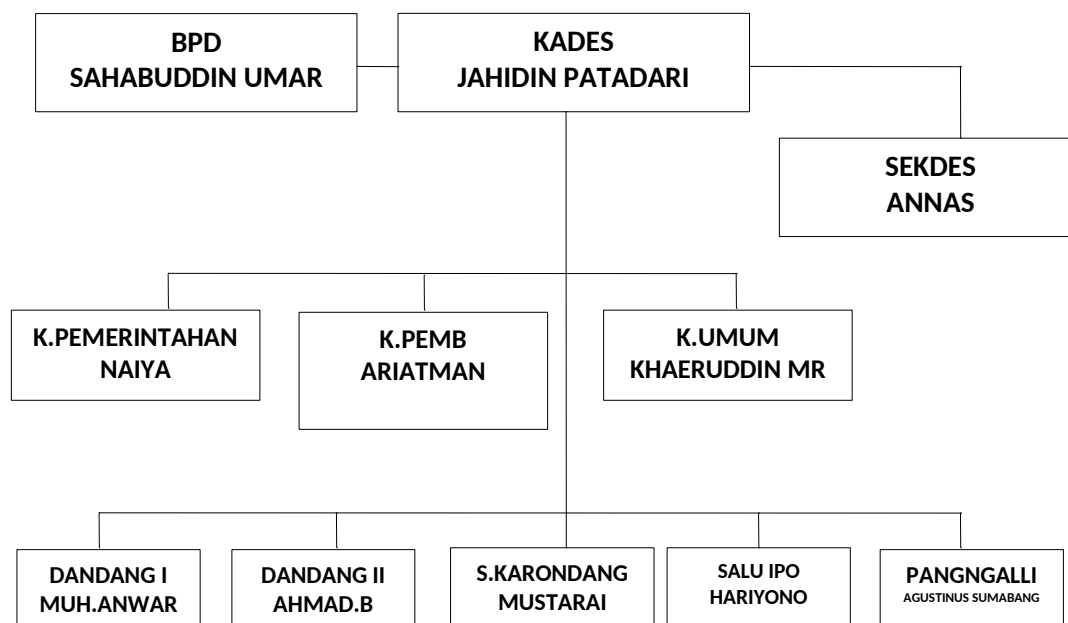
- 1) Pra sekolah : 25 %
- 2) SD : 20 %
- 3) SMP : 5 %
- 4) SLTA : 20 %
- 5) Sarjana : 20 %

c. Mata pencaharian

Desa Dandang merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Petani : 35 %

- 2) Pedagang : 20 %
 3) PNS : 20 %
 4) Buruh : 25 %.¹



Struktur Pemerintahan Desa Dandang

b. Desa Buangin

Desa buangin merupakan desa tertua dan merupakan desa terluas di wilayah Kecamatan Sabbang, dan kemudian pada tahun

¹Data statistik Desa Dandang Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara tahun 2013.

1994 Desa Buangin di bagi menjadi Desa Buangin dan Desa Dandang.

Desa buangin berbatasan dengan:

Sebelah utara : Desa Terpedo jaya

Sebelah Timur : Desa Tete Uri

Sebelah Selatan : Desa Dandang

Sebelah Barat : Desa Pararra

Desa Buangin memiliki luas kurang lebih 44 km², yang terdiri dari tanah pemukiman, perkebunan, persawahan, dan Hutan Rakyat, jarak antara Kantor Kecamatan dari utara kurang lebih 12 km.

Desa buangin mempunyai jumlah penduduk 4.158 Jiwa, yang tersebar dalam 5 wilayah dusun yaitu:

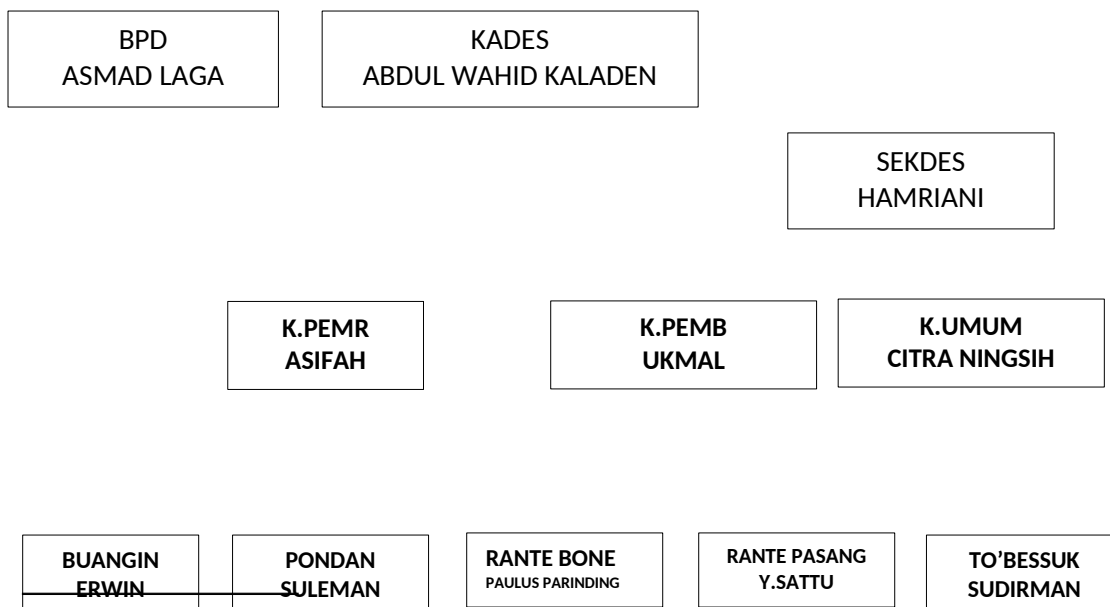
- | | | |
|------------------------|--------------|----------|
| 1. Buangin | : 1.236 jiwa | : 387 KK |
| 2. Pondan | : 473 Jiwa | : 121 KK |
| 3. Rante Bone | : 1.392 jiwa | : 329 KK |
| 4. Rante Pasang | : 785 Jiwa | : 173 KK |
| 5. To' Bessuk | : 270 jiwa | : 73 KK |

Tingkat Pendidikan atau SDM di Desa Buangin :

1. Pra sekolah : 451 orang
2. SD : 465 Orang

- 3. SMP : 320 Orang
- 4. SLTA : 166 Oang
- 5. Sarjana : 16 Orang

Mata pencaharian masyarakatnya adalah dominan bertani, karena wilayah desa buangin merupakan Desa pertanian, pedagang 20 %, dan PNS 10 %.²



²Data statistik Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kab. Luwu Utara tahun 2013.

Struktur Pemerintahan Desa Buangin

2. Peran dan Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik

a. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik

Konflik antarpemuda antara pemuda Desa Dandang dengan Desa Buangin bermula pada kegiatan perayaan 17 Agustus tahun 2009 di Kecamatan Sabbang berpusat di Desa Marobo. Pada saat itu terjadi konflik di dalam lapangan antara pemuda Dandang dan Buangin yang berlanjut di luar lapangan. Saat kembali dari kegiatan tersebut pemuda Desa Dandang dihadang oleh pemuda dari Desa Buangin yang mana pada saat itu pemuda Desa Buangin sedang mabuk. Mereka melempari pemuda Desa Dandang yang melintas pada saat itu. Karena merasa dilecehkan, pemuda Desa Dandang kemudian membalas lemparan mereka. Setelah itu, pemuda Desa Dandang melakukan penyerangan ke Desa Buangin dengan menggunakan sentaja rakitan dan senjata tajam. Pada awal-awal konflik, hanya pemuda saja yang terlibat namun karena konflik semakin membesar, maka orang-orang tua pun ikut terlibat.³

³Jahidin Patadari, *Wawancara*, Kepala Desa Dandang, pada 07 Pebruari 2014.

Selang beberapa hari setelah terjadinya konflik, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dengan melibatkan berbagai unsur terkait seperti Kepala Desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, berupaya memediasi agar konflik dapat segera dihentikan. Pada proses mediasi itu, dihadiri Bupati Luwu Utara, Ketua DPRD, Kapolres Luwu Utara, Kapolsek Sabbang, Danramil, Brimob Baebunta, dan Camat Sabbang.

Pada pertemuan tersebut, disepakati agar kedua belah pihak yang bertikai segera berdamai. Selain itu, disepakati agar kedua belah pihak tidak menyimpan dendam. Sebagai upaya resolusi konflik, disepakati bahwa jika dikemudian hari salah satu pihak memulai dan memicu konflik, akan diserahkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian. Disepakati pula untuk menyerahkan semua jenis senjata kepada pihak berwenang.

Upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara pada kenyataannya tidak berjalan efektif. Mediasi yang dilakukan dianggap seremonial semata sehingga tidak berdampak secara signifikan bagi kelompok yang bertikai. Dalam kehidupan social, hubungan antara kedua desa tetap renggang. Puncaknya terjadi pada awal Maret tahun 2010 konflik antarpemuda Desa Dandang dengan Desa Buangin kembali terjadi. Pemicu

konflik adalah ulah pemuda Desa Buangin yang melempari anak sekolah dari Desa Dandang yang melintasi desa mereka. Pada saat itu, masyarakat Desa Dandang mengadukan hal tersebut kepada pihak berwenang namun laporan tersebut tidak diindahkan oleh aparat kepolisian. Karena merasa kecewa atas sikap tersebut, pemuda Desa Dandang kembali melakukan penyerangan ke Desa Buangin. Saat konflik terjadi, pemerintah daerah melalui perangkat hukum dan pihak berwenang segera mengambil tindakan. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan represi terhadap kedua belah pihak yang bertikai. Tindakan represif aparat keamanan justru semakin memicu keinginan kedua belah pihak untuk berontak sehingga berujung pada konflik itu sendiri.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam rangka penanganan konflik antara pemuda Desa Dandang dengan Desa Buangin adalah sebagai mediator. Dengan demikian, peran tersebut adalah memediasi pihak-pihak yang bertikai agar segera menyelesaikan konflik.

Mediasi adalah proses penyelesaian konflik melalui proses perundingan atau mufakat para pihak yang bertikai dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau

memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau consensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang bertikai.⁴

Pada proses mediasi para pengambil keputusan adalah pihak-pihak yang terlibat konflik, sedangkan proses dikendalikan secara tegas oleh mediator (walaupun secara informal bersama pihak yang berkonflik). Mediator juga berperan sebagai fasilitator sehingga ia harus orang yang independen sekaligus netral. Pihak mediator berpartisipasi penuh dalam memutuskan masalah, menciptakan, mengevaluasi, dan menyetujui pilihan. Sedangkan hasil yang muncul diharapkan diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik dengan hasil yang saling menguntungkan satu sama lain.

Berdasarkan uraian tersebut, maka upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara adalah melakukan konsensus damai dengan melibatkan kedua belah pihak yang bertikai serta pihak ketiga yang dianggap netral, tidak

⁴Didin Kurniawan, *Pengertian Mediasi*, dalam <http://didinashter.blogspot.com>.

memihak pada salah satu pihak yang bertikai. Pihak ketiga tersebut adalah pihak keamanan, baik TNI maupun POLRI, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dan DPRD.

b. Upaya Pemerintah daerah dalam Penyelesaian Konflik

Upaya dalam pengertian ini adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh suatu pihak dengan maksud dan tujuan tertentu. Dengan demikian, untuk memahami lebih jauh mengenai upaya pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam menangani konflik antara pemuda Desa Dandang dengan Desa Buangin, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu usaha pada saat terjadi konflik, usaha pada pasca konflik.

1. Upaya Pemerintah Daerah pada saat terjadinya konflik

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pada saat terjadi konflik, upaya yang dilakukan pemerintah adalah menerjunkan aparat keamanan ke lokasi kejadian. Dalam hal ini pemerintah menjalin kerjasama dengan aparat kepolisian dan Brimob Baebunta serta aparat TNI untuk meredakan konflik.

Sebagaimana diungkapkan oleh responden.

“Kalau sudah ada laporan dari masyarakat bilang berkelahi lagi orang di Dandang, langsung dihubungi cepat aparat keamanan supaya pergi ke lokasi amankan i. Cuma masalahnya, perang memangmi orang di sana baru datang aparat jadi bisa dibilang kayak pahlawan kesiangin itu polisi, perangmi orang baru datang.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh gambaran bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani konflik adalah dengan menerjunkan aparat keamanan ke lokasi konflik.

Menurut Hasrum Jaya, upaya tersebut dianggap kurang efektif.

“Tidak ada langkah konkrit yang dilakukan untuk mangantisipasi. Nanti terjadi baru turun rame-rame, itupun turunnya juga terlambat.”⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah tersebut dianggap kurang efektif untuk menyelesaikan konflik. Menurut Hasrum Jaya, untuk mengatasi konflik yang terjadi, harus didasarkan pada penyebab utama terjadinya konflik.

2. Upaya Pemerintah Daerah pasca konflik

Menangani sebuah konflik bukan hal mudah. Hal yang paling penting untuk dilakukan adalah penanganan pasca konflik tersebut.

⁵Haris, *Wawancara*, Pemuda Desa Dandang, pada 08 Pebruari 2014

⁶Hasrum Jaya, *Wawancara*, FKPPS Kecamatan Sabbang, pada 07 Pebruari 2014

Upaya pemerintah dalam hal ini adalah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk untuk mengetahui lebih dalam faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya konflik.

Selain melakukan identifikasi tentang penyebab konflik, juga mencoba memediasi pihak-pihak yang terlibat konflik untuk segera berdamai. Hal ini tampak dari upaya pemerintah menghadirkan semua elemen yang terkait untuk bersama-sama memikirkan solusi penyelesaian konflik dan mencegah terjadinya konflik susulan.

“Waktu sudahmi perang toh, datang mi pemerintah mediasi ini masalah. Waktu itu dihadirkanmi unsur pemerintah mulai dari pemerintah desa sampai kabupaten, adami juga polisi sama tentara. Waktu itu sepakatmi kedua belah pihak untuk berdamai toh. Nah supaya tidak terjadimi lagi konflik dibikinmi kesepakatan, siapa-siapa saja yang mulai lagi konflik diserahkan sama polisi. Semua senjata juga harus diserahkan sama polisi.”⁷

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah pasca konflik adalah memediasi pihak-pihak yang bertikai untuk segera menghentikan konflik. Untuk menghindari terjadinya konflik susulan, diadakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk menyerahkan senjata yang digunakan pada saat perang.

⁷Abdul Wahid Kaladen, *Wawancara*, Kepala Desa Buangin, pada 08 Pebruari 2014

Menurut Hasrum Jaya, penanganan konflik secara menyeluruh harus dimulai dari penyebab terjadinya konflik.

“Indikasi yang kami dapatkan, pertama kurangnya kegiatan-kegiatan yang bernuansa positif, kedua karena kurangnya lapangan kerja dan lain sebagainya, sehingga tidak ada peran-peran yang bisa dilakukan sehingga waktunya banyak terbuang dan lain sebagainya toh, tidak ada pemberdayaan dari pemerintah.”⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor utama terjadinya konflik adalah minimnya lapangan kerja sehingga pemuda Desa Dandang dan Buangin lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkumpul bersama teman-teman yang biasanya disertai dengan konsumsi minuman keras.

Dengan demikian, untuk menyelesaikan konflik, maka yang harus dilakukan adalah mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan positif di kalangan pemuda serta melakukan pemberdayaan, terutama mendorong tumbuhnya lapangan kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Andi Suriadi menegaskan:

“Kalau bicara konflik, susah sekali memang untuk diatasi. Kalau pemerintah desa seperti Kepala Desa Buangin sekarang ini sementara membenahi lapangan bola supaya anak-anak muda punya kegiatan positif.”⁹

⁸

Hasrum Jaya, *Wawancara*, FKPPS Kecamatan Sabbang, pada 08 Pebruari 2014.

⁹Andi Suriadi, *Wawancara*, DPRD Kabupaten Luwu Utara, pada 09 Pebruari 2014.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebagai salah satu upaya dalam menangani konflik adalah menciptakan kegiatan-kegiatan bernuansa positif agar pemuda dapat mengekspresikan hobi dan kesenangan mereka.

Menurut Andi Suriadi, yang perlu dilakukan saat ini adalah membuka ruang komunikasi yang lebih baik antara kedua belah pihak.

“Makanya konflik ini agak-agak susah untuk kita redam karena apa kurangnya sekarang komunikasi, tatap muka antar kedua belah pihak, inilah sementara kita carikan bagaimana jalan supaya kesenjangan sosial yang terjadi antara pemuda dandang dan buangin ini bisa kita retas, kita hilangkan.”¹⁰

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab konflik terus berlanjut adalah kesenjangan sosial yang terjadi antara kedua belah pihak. Upaya yang dilakukan adalah dengan membuka ruang-ruang komunikasi antara kedua belah pihak untuk memfasilitasi berbagai kepentingan.

3. Kendala dalam Penyelesaian Konflik

¹⁰Andi Suriadi, *Wawancara*, DPRD Kabupaten Luwu Utara, pada 09 Pebruari 2014.

Konflik yang terjadi antara kelompok pemuda Desa Dandang dengan Buangin pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor berikut.

a. Kurangnya lapangan kerja

Berdasarkan hasil dari wawancara yang didapatkan melalui informan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik yaitu kurangnya lapangan kerja. Minimnya lapangan kerja yang tersedia membuat para pemuda yang biasanya tergabung dalam kelompok-kelompok (geng) lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkumpul dan mengkonsumsi minuman keras. Pada kondisi mabuk ini yang sebagian besar menjadi pemicu konflik di berbagai daerah termasuk konflik Dandang-Buangin. Seperti penuturan Hasrum Jaya:

“Kurangnya lapangan kerja di Luwu Utara ini mie juga yang memicu terjadinya konflik karena berkurangnya aktifitas masyarakat sehingga mereka biasanya banyak mengonsumsi minuman keras yang bisa membuat mereka tidak sadar sehingga mereka biasanya mengganggu orang yang melintas di daerah mereka.”¹¹

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa salah satu pemicu sekaligus kendala dalam menyelesaikan konflik yang terjadi adalah minimnya lapangan kerja yang tersedia di Luwu Utara. Faktor lain yang merupakan bias dari faktor utama tersebut adalah maraknya peredaran minuman keras di kalangan pemuda.

b. Motif balas dendam

¹¹Hasrum Jaya, *Wawancara*, FKPPS Kecamatan Sabbang, pada 08 Pebruari 2014.

Konflik yang terjadi pada dasarnya merupakan rentetan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Andi Suriadi:

“Konflik pertama sampai sekarang sebenarnya kan rentetan dari konflik-konflik sebelumnya. Artinya, ada unsur balas dendam antara pemuda Desa Dandang dengan Desa Buangin dan ini yang susah untuk dikendalikan. Namanya dendam itu kan susah ditau, bisa jadi waktu dikasi damai nabilang tidak ada dendam, tapi pas naliat orang yang pernah sakiti pasti tidak bisaki jamin bisa nakedalikan dirinya, apalagi adami yang jadi korban toh dan sebagai keluarga pasti tidak bisa ikhlas terimai apalagi kalo matinya juga secara tragis.”¹²

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa konflik yang terus berlanjut antara pemuda Desa Dandang dengan pemuda Desa Buangin pada dasarnya dipicu oleh dendam yang ada pada setiap kelompok yang bertikai. Hal ini berarti bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam penyelesaian konflik adalah adanya dendam di kalangan kelompok yang bertikai. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad, salah seorang responden dari Desa Dandang.

“Kalau ada teman kami yang di ganggui atau dipukul pasti kami balas kalau kami dapat yang memukul teman kami, kalau kami tidak dapat pelakunya sembarangmi kami pukul yang penting temannya.”¹³

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor balas dendam ini merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak agar segala dendam yang ada di antara mereka dapat dihapuskan.

c. Kesenjangan pribadi dan ego

¹²Andi Suriadi, *Wawancara*, DPRD Kabupaten Luwu Utara, pada 09 Pebruari 2014.

¹³Ahmad, *Wawancara*, Pemuda Desa Dandang, pada 10 Pebruari 2014.

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya konflik adalah kesenjangan pribadi dan ego masing-masing kelompok untuk dianggap lebih hebat dan lebih berkuasa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Satriawan:

“Kalau ada masalahku sama anak-anak, siceritakan sama teman-temanku dan biasanya mau bantuka. Anak-anak di sini itu saling membantu kalau ada masalah, tinggi persaudaraannya. Jadi kalau ada masalah tidak pernah itu bilang sendiriki hadapi apalagi kalau yang ditemani bermasalah orang-orang yang pernah memang baku bentrokki”¹⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pribadi dalam kelompok masyarakat yang bertikai di mana persoalan pribadi kemudian menjadi persoalan komunal atau kelompok. Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Selain itu, muncul ego di kalangan kelompok-kelompok yang bertikai untuk menunjukkan keberanian dan kehebatan masing-masing, tidak ada lagi sikap saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ariatman:

“Tidak ada memangmi saling menghargai antara mereka. Merasa mi juga bilang mereka paling jago dan paling berani.”¹⁵

Mencermati berbagai persoalan di atas, secara umum dapat dipahami bahwa konflik yang terjadi antara pemuda Desa Dandang dengan Desa Buangin bukan hal mudah untuk diselesaikan. Dibutuhkan kerjasama antara semua pihak yang terkait untuk menemukan solusi tepat agar konflik yang terjadi tidak terus menerus terjadi.

¹⁴Satriawan, *Wawancara*, Pemuda Desa Buangin, pada 11 Pebruari 2014.

¹⁵Ariatman, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat Desa Dandang, pada 11 Pebruari 2014.

Pada kenyataannya, upaya mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak berdampak secara signifikan terhadap penyelesaian konflik. Indikasi yang muncul adalah konflik tersebut terus terjadi hingga tahun 2014 ini.

d. Minimnya mediator

Salah satu faktor yang menjadi penyebab sulitnya penanganan konflik adalah minimnya mediator yang mampu berperan secara signifikan dan memiliki pengaruh terhadap kedua belah pihak. Konflik antarpemuda Desa Dandang dengan Desa Buangin bukan konflik pribadi tetapi meluas pada konflik komunal dan sosial sehingga dibutuhkan lebih banyak pihak yang terlibat secara aktif dan bersama-sama dalam menyelesaikan konflik. Berkenaan dengan hal tersebut, Mudjahidin Ibrahim menegaskan:

“Agak susah memang ini konflik di atasi apalagi kalau mau diserahkan sepenuhnya sama pemerintah. Masalahnya sedikit ji orang yang mampu berperan betul-betul untuk selesaikan konflik. Selama ini yang kami lakukan adalah mengkomunikasikan segala persoalan dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, Polisi dan TNI, Masyarakat termasuk Pemuda. Tapi kenyataannya konflik itu terjadi terus.”¹⁶

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa minimnya mediator yang berperan aktif dan signifikan merupakan salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik. Ini berarti bahwa, mediator-mediator yang selama ini digunakan untuk memfasilitasi konflik dipandang gagal dalam menyelesaikan masalah yang ada. Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan

¹⁶Mudjahidin Ibrahim, *Wawancara*, Sekda Kabupaten Luwu Utara, pada 07 Pebruari 2014.

bahwa mediasi melalui rekonsiliasi merupakan satu-satunya upaya yang dianggap mampu menyelesaikan konflik yang ada walaupun kenyataannya, konflik tersebut masih terus terjadi.

B. Pembahasan

Konflik antara kelompok pemuda Desa Dandang dengan Desa Buangin pada dasarnya dipicu oleh ketersinggungan kelompok yang satu dengan kelompok lain. Dalam konteks ini, pemuda Desa Dandang merasa tersinggung atas ulah pemuda Desa Buangin yang melempari mereka sesaat setelah berlangsungnya pertandingan sepak bola pada acara 17 Agustus tahun 2009. Inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya konflik yang pada tahap selanjutnya dipicu oleh kejadian-kejadian lain namun melibatkan pihak yang sama yaitu pemuda Dandang dengan pemuda Buangin.

Atas kondisi tersebut, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa terjadinya konflik yang terus terjadi hingga saat ini adalah adanya dendam antara masing-masing kelompok sehingga hal-hal sepele pun kadang-kadang menjadi pemicu terjadinya konflik besar yang melibatkan kelompok pemuda dari kedua desa tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sekaligus sebagai upaya penanganan konflik adalah melalui mediasi dan rekonsiliasi. Selain upaya mediasi, upaya yang dilakukan adalah represi terhadap kelompok-kelompok yang bertikai. Upaya tersebut dianggap efektif untuk meredakan konflik walaupun pada kenyataannya tidak mampu menyelesaikan konflik. Upaya tersebut hanya mampu menyelesaikan konflik secara sementara namun tidak dapat menjadi solusi yang sifatnya permanen.¹⁷

Mencermati keadaan tersebut, dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara belum menunjukkan peran strategis dalam upaya penanganan konflik. Hal ini dapat dilihat bahwa tindakan represi pemerintah melalui aparat keamanan adalah bentuk penanganan konflik yang sifatnya temporer. Represi tersebut hanya menghentikan konflik secara sementara, terutama sesaat setelah konflik tersebut berlangsung. Akibatnya, pada saat yang lain konflik dapat terjadi kembali. Upaya mediasi yang dilakukan juga terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan sehingga tidak menemukan solusi yang paling tepat dalam penyelesaian konflik.

¹⁷Bahrum, *Wawancara*, Tokoh Pemuda Desa Baungin, pada 12 Pebruari 2014.

Hal yang menarik perhatian penulis adalah adanya indikasi bahwa konflik tersebut terjadi karena minimnya kegiatan-kegiatan pemuda yang bernuansa positif serta minimnya lapangan kerja yang tersedia. Kondisi tersebut dianggap menjadi pemicu munculnya geng-geng di kalangan kelompok pemuda sebagai wujud eksistensi diri. Kemunculan geng ini diikuti dengan makin maraknya konsumsi minuman keras. Dalam berbagai kasus, baik yang terjadi di Desa Dandang-Buangin, maupun yang terjadi di daerah lain, minuman keras merupakan pemicu utama terjadinya berbagai kesenjangan di kalangan masyarakat khususnya pemuda.¹⁸

Jika memandang konflik sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan, termasuk distribusi tenaga kerja, maka yang patut diperhatikan adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap untuk didistribusikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Sekda Kabupaten Luwu Utara, Mudjahidin Ibrahim menegaskan bahwa masyarakat Dandang dan Buangin harus memperhatikan Sumber Daya Manusia yang ada. Hal yang harus diperhatikan adalah pendidikan generasi muda. Dengan

¹⁸Mapellawa, *Political Thought: Konflik dan Manajemen Konflik Luwu*, dalam <http://mapellawa.blogspot.com>.

memperhatikan pendidikan generasi muda masing-masing desa melalui peningkatan pendidikan, maka secara otomatis Sumber Daya Manusia dengan sendirinya akan terbangun dan akan lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan.¹⁹

Berbeda dengan pandangan tersebut, Hasrum Jaya, ketua FKPPS Kecamatan Sabbang memandang bahwa yang harus sadar dan berbuat untuk meningkatkan SDM manusia adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Peningkatan SDM dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dan kemampuan individu. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada pemuda terutama yang sudah putus sekolah.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka merujuk pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa poin penting.

Pertama, konflik antara pemuda Desa Dandang dan Buangin merupakan konflik antarpemuda bermotif kesenjangan pribadi yang dipicu oleh ketersinggungan oleh salah satu pihak atas ulah pihak

¹⁹Mudjahidin Ibrahim, *Wawancara*, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, pada 07 Pebruari 2014.

²⁰Hasrum Jaya, *Wawancara*, FKPPS Kecamatan Sabbang, pada 08 Pebruari 2014.

lain yang kemudian rentetan konflik tersebut bermuara pada munculnya dendam di masing-masing kelompok;

Kedua, peran pemerintah dalam menangani konflik antara pemuda di Desa Dandang dan Desa Buangin dianggap kurang signifikan karena upaya penyelesaian yang dilakukan melalui mediasi dan represi hanya mampu menghentikan konflik untuk sementara waktu namun tidak dapat menyelesaikan konflik secara permanen;

Ketiga, upaya pemerintah dalam menangani konflik terbatas pada tindakan represi pada saat terjadi konflik dan melakukan mediasi melalui rekonsiliasi pasca konflik;

Keempat, pemerintah daerah menghadapi kendala dalam penanganan konflik karena konflik tersebut dipicu oleh minimnya lapangan kerja sehingga melahirkan budaya geng dan minuman keras di kalangan pemuda, adanya dendam antara kedua belah pihak, kesenjangan pribadi dan egoisme, serta minimnya mediator yang mampu memediasi konflik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab konflik pertama kali adalah ketersinggungan salah satu pihak yang bermula pada saat berlangsungnya kegiatan 17 Agustus yang berpusat di Desa Marobo Kecamatan Sabbang pada tahun 2009. Konflik kemudian tersu terjadi karena adanya dendam di antara masing-masing pihak dan minimnya lapangan kerja yang tersedia sehingga menimbulkan budaya geng di kalangan pemuda.

2. Peran Pemerintah Daerah Luwu Utara terhadap penyelesaian konflik antarpemuda di Desa Dandang dan Desa Buangin Kecamatan Sabbang adalah sebagai mediator, yaitu memediasi pihak-pihak yang bertikai untuk membahas penyelesaian konflik dengan melibatkan semua unsur yang terkait.

3. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi konflik antara lain adalah, adanya dendam pada masing-masing kelompok, kesenjangan pribadi dan egoisme, serta minimnya mediator konflik.

B. Saran

Mencermati hasil penelitian di atas, penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebaiknya mengupayakan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia terutama di daerah rawan konflik, juga mengupayakan terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas. Selain itu, harus menciptakan kegiatan-kegiatan positif untuk menyalurkan minat masyarakat.
2. Kepada masyarakat Desa Dandang dan Desa Buangin agar membantu pemerintah menyelesaikan konflik, melakukan pembinaan dan pendidikan bagi kaum muda.
3. Kepada semua pihak agar kiranya saling mengingatkan dalam bentuk sikap, sifat dalam hal ini menyangkut soal aqidah. Memperbaiki atau meningkatkan hubungan kepada Allah dan memperbaiki hubungan kepada sesama manusia sebagai makhluk sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, Atosokhi Gea, dkk. *Relasi dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002.
- Ardiansyah, Syarifuddin Iskandar. *Konflik Etnis Samawa dengan Etnis Bali: Tinjauan Sosial Politik dan Upaya Resolusi Konflik*. Sumbawa Besar: FISIP Universitas Samawa, 2010.
- AW, Suranto. *Komunikasi Efektif untuk Mendukung Kinerja Perkantoran*. online: www.uny.ac.id, 07 Oktober 2013.
- Curtis, Daw B., Floyd, James J. Winsor, Jerry L. *Komunikasi Bisnis dan Professional*. Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Dean, Pruitt G. dan Jeffrey Z. Rubbin. *Teori Konflik Sosial Seri Psikologi Sosial*. Cet. V; Alih Bahasa Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Devito, Joseph A. *Komunikasi Antar Manusia*. Edisi V; Jakarta: Profesionals Books, 1997.
- Dwipayana, A. A. GN Ari, dkk. *Merajut Modal Sosial untuk Perdamaian dan Integrasi Sosial*. Yogyakarta: Fisipol UGM, 2001.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- _____. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Cet. XIX; Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Fajar, Dewanto Putra. *Komunikasi-Konflik dalam Perspektif Kehendak Bebas*. Jurnal Komunikasi Massa Volume V No. 1 Januari 2012.
- Fisher, dkk. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council, 2001.

- Francis, Diana. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills, 2006.
- Hasani, Yusuf. *Efektivitas Komunikasi Pemuka Pendapat dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat di Maluku Utara*. Bogor: Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2004.
- HP, Masyhuri. *Asas-Asas Komunikasi*. Cet. I; Semarang: IKIP Semarang Press, 1991.
- Jaya, Hasrum. *Konflik Sabbang yang Tak Kunjung Padam*. dalam <http://hasrumjaya.blogspot.com>, diakses pada 10 Agustus 2013.
- Lafari, Deri. *Peran Pemerintah Daerah Rokan Hulu dalam Mengatasi Konflik Tanah Ulayat Tahun 2011: Studi Kasus Masyarakat Desa Tandun Kecamatan Tandun dengan PT Perkebunan Nusantara V Sei Tapung*. Riau, Fakultas Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeritas Riau, 2010.
- Ludlow, Ron dan Panton, Fergus. *Komunikasi Efektif*. Cet. I; Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 2006.
- Maftuh, Bunyamin. *Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2005.
- Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver & Woodhouse, Tom. *Resolusi Damai Konflik Kontempore*. terj. Tri Budhi Satrio. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad, Arni. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989.
- Nawangsari, Sri. *Seri Diktat Kuliah: Komunikasi Bisnis*. Depok: Universitas Gunadharma, t.th.
- Novri, Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Media Group, 2010.

- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012.
- Prayud. *Peranan Kepala Daerah dalam Penanganan Gangguan Keamanan*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. V, No. 06/II/P3DI/Maret/2013.
- Rivai, Veitzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Scannell, Mary. *The Big Book of Conflict Resolution Game*. United States of America: McGraw-Hill Companies, Inc., 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- _____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru; Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaeman, M. Munandar. *Dasar-Dasar Konflik dan Model Resolusi Konflik pada Masyarakat Desa Pantura Jabar*. Padjajaran: Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Sosiohumaniora, Vol. 12, No. 2, Juli 2010.
- Suprpto, Tommy, *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Cet. I; Yogyakarta: Caps, 2011.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Widjaja, H. A.W. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

**DOKUMENTASI PROSES MEDIASI DAN PERDAMAIAN
DESA DANDANG DAN DESA BUANGIN
TAHUN 2010**



Sumber ; Arsip Dokumentasi Humas Pemda Luwu Utara, 2010



Sumber ; Arsip Dokumentasi Humas Pemda Luwu Utara, 2010

**EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH LUWU
UTARATERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARPEMUDA DI DESA DANDANG
DAN
DESA BUANGIN KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU
UTARA
(STUDI ANALISIS KOMUNIKATOR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Komunikasi
Islam (S.Kom.I) pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palopo

Oleh,

**ABDUL SALAM
NIM 08.16.6.0005**

**PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM JURUSAN DAKWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALOPO
2014**

**EFEKTIVITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH LUWU
UTARATERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARPEMUDA DI DESA DANDANG
DAN
DESA BUANGIN KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU
UTARA
(STUDI ANALISIS KOMUNIKATOR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I) pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Jurusan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Palopo

Oleh,

ABDUL SALAM

NIM 08.16.6.0005

Dibimbing Oleh,

1. Dr.Abdul Pirol, M.Ag
2. Drs. Baso Hasyim, M.Sos.I

**PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM JURUSAN DAKWAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALOPO**

2014

RIWAYAT HIDUP



Abdul Salam, dilahirkan di Malelara Desa Tandung Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Pada tanggal 09 Januari 1990 dari Pasangan M. Addas Abbas, BA dan Hadariah, P., S.Pd,AUD. Menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2002 di SDN 024 Tandung, Tamat MTsN Masamba tahun 2005, dan

tamat MAN Masamba tahun 2008.

Pada tahun 2008 melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo dan diakhir studinya menulis sebuah skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam yang berjudul “ Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Konflik Antarpemuda di Desa Dandang dan Desa Buangin Kecamatan Sabbang Kabbupaten Luwu Utara (Studi Analisis Komunikator).